

---

## Efektivitas Implementasi Anggaran Desa Berdasarkan Pendekatan Akuntansi Kinerja di Desa Cariu

Nur Maelani<sup>1</sup>, Aisyah Indarsari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Digital

<sup>1</sup>[nur10221264@digitechuniversity.ac.id](mailto:nur10221264@digitechuniversity.ac.id), <sup>2</sup>[aisyahindarsari@digitechuniversity.ac.id](mailto:aisyahindarsari@digitechuniversity.ac.id)

---

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi anggaran di Desa Cariu menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Tujuannya untuk mengevaluasi efektivitas anggaran, mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan, serta merumuskan strategi peningkatan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen, lalu dianalisis dengan *software* NVivo 12. Hasil menunjukkan implementasi anggaran cukup efektif dengan akuntabilitas yang tercermin dalam keterlibatan masyarakat dan pelaporan keuangan berkala. Faktor pendukung meliputi koordinasi perangkat desa dan transparansi, sedangkan hambatan muncul pada teknis administrasi serta pemahaman prosedur keuangan. Kesimpulannya, penguatan administrasi teknis, peningkatan peran kepala desa, dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitas anggaran sesuai prinsip akuntansi berbasis kinerja.

**Kata kunci:** Implementasi anggaran desa; Akuntansi berbasis kinerja; Efektivitas; Akuntabilitas.

### Abstract

*This research analyzes the effectiveness of budget implementation in Cariu Village using a descriptive qualitative method with a case study. The aim was to evaluate budget effectiveness, identify supporting factors and barriers, and formulate improvement strategies. Data were obtained through observation, interviews, and document analysis, then analyzed with software NVivo 12. The results show that budget implementation is quite effective with accountability reflected in community involvement and periodic financial reporting. Supporting factors include coordination of village officials and transparency, while obstacles arise in technical administration and understanding of financial procedures. In conclusion, strengthening technical administration, increasing the role of the village head, and community participation are needed to optimize budget effectiveness according to performance-based accounting principles.*

**Keywords:** Village budget implementation; Performance-based accounting; Effectiveness; Accountability.

---

## PENDAHULUAN

Desa memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama melalui kontribusi di sektor pertanian, pariwisata, dan industri rumah tangga yang mendukung Produk Domestik Bruto (PDB) serta penerimaan pajak negara (Rony, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki otonomi untuk menentukan kebijakan pembangunan, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi. Meski demikian, otonomi ini juga membawa tantangan besar dalam hal pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan (Opransiski & Mashur, 2023).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berperan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi seluruh kegiatan pembangunan desa. Efisiensi dan transparansi APBDes ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang tepat sasaran (Raidons & Djawang, 2022). Namun, peningkatan dana ini sering kali menghadapi tantangan pengawasan, sehingga

---

rawan terjadi penyalahgunaan Pemerintah juga mendukung pembangunan desa melalui program Dana Desa, yang terus meningkat hingga Rp. 71 triliun pada tahun 2024 (Mariyadi, 2024).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang alokasi dan penggunaan dana desa sangat penting dalam memastikan keberhasilan program pembangunan desa. Misalnya, penelitian Mauro et al. (2021), Yulia dan Ningsih (2020), dan Wongkar et al. (2021) menjelaskan bahwa tanpa pemahaman yang memadai, pengelolaan dana desa yang tidak tepat dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan dan korupsi. Hal ini tercermin dari laporan *Indonesian Corruption Watch (ICW)* Lalora Ester pada tahun 2021 yang mengungkapkan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan dana desa (Kumparan, 2022).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diterapkan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Reimassa et al. (2021) menunjukkan bahwa PBK dapat meningkatkan efisiensi anggaran, meskipun keberhasilannya dipengaruhi oleh budaya organisasi, pelatihan, dan sistem informasi. Sofyani (2018) menyoroti pentingnya sistem informasi andal, sementara Selviani (2020) mengungkapkan bahwa PBK berkontribusi positif terhadap akuntabilitas pemerintah.

Dalam *Theory Agency* Jensen & Meckling (1976), pemerintah desa sebagai agen bertanggung jawab mengelola sumber daya untuk kepentingan masyarakat sebagai prinsipal. Sementara itu, teori Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) Christian Lorenz (2012) menekankan pentingnya alokasi anggaran berbasis pencapaian kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana desa. Penerapan teori ini diharapkan dapat mengurangi pemborosan dan memastikan dana digunakan sesuai prioritas pembangunan.

Desa Cariu, dengan potensi besar di sektor pariwisata dan pertanian, menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran, seperti keterbatasan sumber daya manusia Astuti et al. (2023) dan rendahnya partisipasi masyarakat (Wijayanti & Taufik, 2022). Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan akuntansi berbasis kinerja di Desa Cariu untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran, serta menyusun strategi optimalisasi pengelolaan anggaran desa di Desa Cariu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya memperbaiki pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

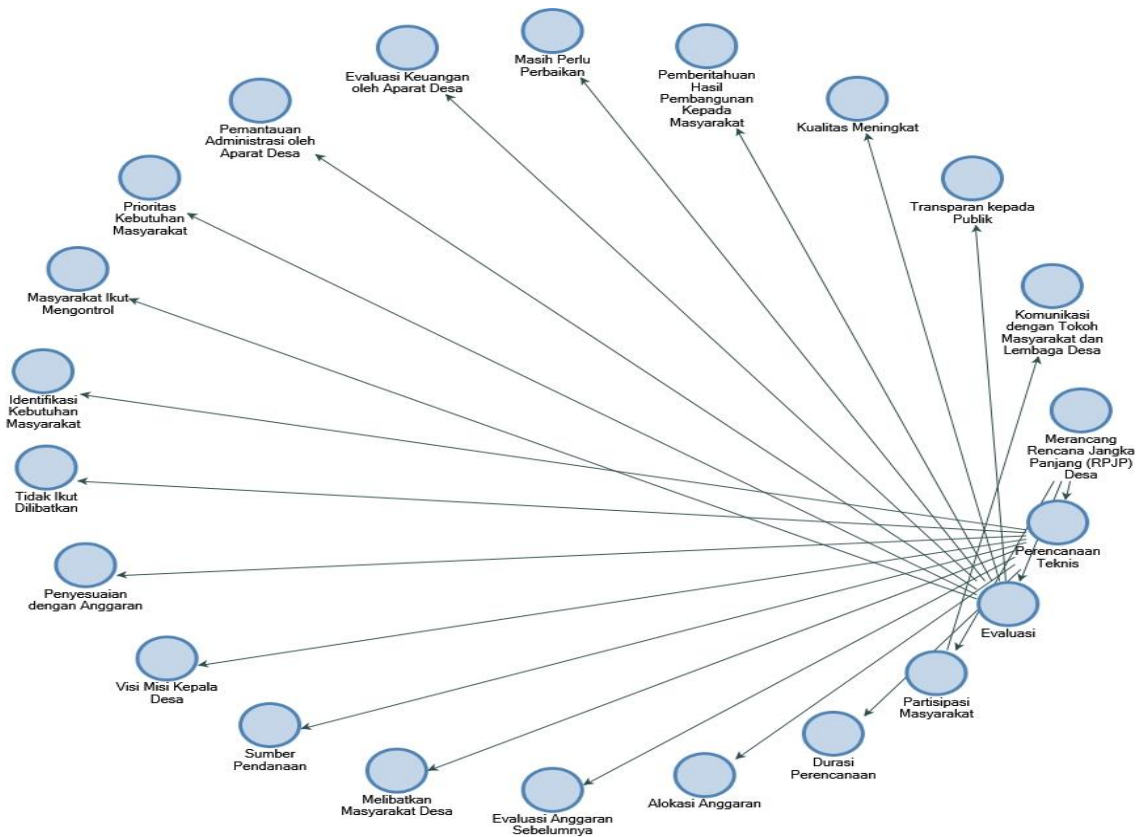
## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami implementasi anggaran berbasis kinerja di Desa Cariu, Kabupaten Bogor. Metode ini dipilih karena mampu menggali fenomena secara mendalam (Nasution, 2023). Subjek penelitian terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan anggaran desa. Wawancara mendalam secara terstruktur dilakukan berdasarkan indikator akuntansi berbasis kinerja dari Christian Lorenz (2012). Data sekunder diperoleh dari dokumen APBDes Desa Cariu 2024, sebagaimana disarankan Sugiyono (2022) untuk melengkapi data primer.

Observasi langsung dilakukan untuk memahami proses pengelolaan anggaran, seperti perencanaan dan pelaksanaan proyek, yang sering mengungkap dinamika tersembunyi dalam wawancara dan dokumen (Fiantika, 2022). Data dianalisis menggunakan NVivo 12 untuk pengkodean dan visualisasi. Tambun dan Sitorus (2023) menyatakan NVivo mempermudah analisis sistematis. Hasilnya dibandingkan dengan teori agensi dan akuntansi berbasis kinerja untuk menghasilkan temuan yang relevan mengenai efektivitas pengelolaan anggaran desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Merancang Rencana Jangka Panjang (RPJP) Desa



Gambar 1. *Project Maps* RPJP Desa Cariu

Dalam menyusun Rencana Jangka Panjang (RPJP) Desa Cariu, Gambar 1. *Project Maps* aspek Perencanaan Teknis dominan dibandingkan Partisipasi Masyarakat dan Evaluasi. Ketua RT menyampaikan bahwa musyawarah tersebut tidak hanya menyosialisasikan rencana pembangunan tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan spesifik. Penelitian Diartika dan Pramono (2021) menegaskan bahwa partisipasi yang efektif dapat meningkatkan keberlanjutan program pembangunan desa. Evaluasi terhadap anggaran sebelumnya berperan sebagai landasan penting dalam merancang RPJP. Dalam konteks *Agency Theory*, evaluasi transparan membantu mengurangi konflik kepentingan antara agen (aparatur desa) dan prinsipal (masyarakat desa), sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa sebagai pemegang mandat.

Namun, aspek komunikasi dengan tokoh masyarakat dan lembaga desa perlu diperkuat untuk meningkatkan partisipasi. Arbayah dan Suparti (2022) menyatakan bahwa musyawarah yang inklusif dapat memperkuat transparansi dan legitimasi perencanaan desa. Dengan demikian, penyusunan RPJP Desa Cariu mencerminkan pentingnya sinergi antara perencanaan teknis yang terstruktur, evaluasi berbasis data, dan keterlibatan masyarakat untuk mencapai pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan.

### Membuat Rencana Operasional Tahunan (RAPB) Desa

Penyusunan Rencana Operasional Tahunan (RAPB) Desa Cariu menunjukkan dominasi aspek perencanaan teknis, terutama pada pengumpulan dan integrasi masukan masyarakat. Analisis menggunakan NVivo 12 memperlihatkan bahwa meskipun masyarakat dilibatkan dalam tahap awal seperti musyawarah dusun, dengan peran terbatas pada pemberian informasi. Ketua RT menyebutkan masyarakat hanya menyampaikan kebutuhan secara umum. Temuan ini sejalan

dengan Arbayah dan Suparti (2022), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sering kali hanya formalitas sehingga kurang memengaruhi pengambilan keputusan.

Meskipun demikian, RAPB Desa tetap mengakomodasikan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan Posyandu di RT.007 Desa Cariu. Nadhiro dan Choiriyah (2024) menyatakan bahwa partisipasi aktif di semua tahap perencanaan dapat meningkatkan akurasi anggaran dan keberlanjutan pembangunan. Menurut *Agency Theory*, Jensen & Meckling (1976) menyoroti ketidakseimbangan informasi yang dapat membuat agen memprioritaskan kepentingan sendiri. Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan mekanisme akuntabilitas seperti pengawasan partisipatif dan transparansi anggaran. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Dengan mengoptimalkan peran masyarakat, RAPB dapat mencerminkan kebutuhan nyata dan mendukung tujuan jangka panjang desa sesuai RPJP.

### **Eksekusi Anggaran Kinerja Tahunan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi anggaran kinerja tahunan di Desa Cariu memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi. Masyarakat terlibat aktif melalui musyawarah desa (Musdes), di mana 70% usulan masyarakat diakomodasi dalam RAPBDes 2024. Kepala desa menyatakan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara aktif melalui Musyawarah Desa. Temuan ini sejalan dengan Rahimallah dan Ricky (2023), yang menekankan partisipasi publik sebagai kunci akuntabilitas. Dalam aspek teknis, pencatatan keuangan dilakuakn dengan detail melalui buku kas umum. Sekretaris desa menjelaskan bahwa setiap transaksi keuangan disertai dengan bukti pendukung untuk menjaga akurasi laporan. Dengan total pendapatan desa sebesar Rp. 48 Miliar pada tahun 2024, sistem pembukuan yang rapi mendukung prinsip akuntansi berbasis kinerja, yang menilai efektivitas anggaran berdasarkan hasil yang dicapai.

Laporan keuangan yang disusun secara berkala juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Ketua RT menyebutkan bahwa laporan triwulan membantu memahami penggunaan dana desa dan memberikan ruang untuk klarifikasi bila diperlukan. Namun, pelaksanaan teknis seperti pengajuan dana masih menghadapi kendala, terutama dalam hal efesiensi waktu. Sekretaris desa mengakui bahwa koordinasi dengan pihak kecamatan perlu ditingkatkan untuk mempercepat proses administrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun akuntabilitas dan transparansi telah diterapkan dengan baik, optimalisasi pelaksanaan teknis masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran (Arisman et al., 2018).

### **Melakukan Pengukuran Kinerja**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran kinerja anggaran desa di Desa Cariu paling banyak menitikberatkan pada aspek pengumpulan data. Aspek ini menjadi dominan karena akurasi dan kelengkapan data sangat menentukan efektivitas evaluasi anggaran. Partisipasi masyarakat juga memegang peranan penting, terutama dalam memberikan masukan yang relevan, yang pada gilirannya memperkuat kualitas data yang dikumpulkan. Temuan ini sejalan dengan Judijanto et al. (2023), yang menegaskan bahwa partisipasi efektif memerlukan pemahaman mendalam dari masyarakat. Selain itu, pengumpulan usulan masyarakat juga menjadi langkah penting dalam menetapkan indikator kinerja yang sesuai dengan kebutuhan lokal, meskipun keputusan akhir tetap bergantung pada prioritas anggaran desa.

Evaluasi dan verifikasi data keuangan dilakukan secara berkala, baik administratif maupun di lapangan, untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Namun, analisis data, meski penting, sering kali kurang dibahas. Padahal, analisis yang komprehensif mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu program, sebagaimana ditegaskan oleh Mardiasmo (2018), yang menyatakan bahwa pengukuran kinerja membantu memastikan optimalisasi sumber daya. Koordinasi antar perangkat desa dalam memanfaatkan hasil pengukuran kinerja juga menjadi aspek penting yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini menegaskan bahwa pengukuran kinerja yang baik dapat meningkatkan partisipasi, transparansi,

dan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran desa.

### **Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Desa Cariu menunjukkan dominasi aspek tindak lanjut, mencerminkan komitmen akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Tindak lanjut meliputi perbaikan program, penyempurnaan prosedur, dan pembangian tugas jelas antara Kepala Urusan (kaur) dan Kepala Seksi (kasi), berkontribusi pada efektivitas pelaksanaan anggaran.

Dalam konteks *Theory Agency*, hubungan pemerintah desa sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal menekankan pentingnya pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan. Tindak lanjut menjadi bentuk pertanggungjawaban dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui transparansi seperti papan informasi proyek dan Musdes (Musyawarah Desa). Kepala desa menyatakan bahwa tindak lanjut dari evaluasi menjadi prioritas utama memastikan masukan masyarakat di Musdes terlaksana, sementara sekretaris desa menyebut hasil evaluasi dijadikan acuan RAPBDes tahun berikutnya. Penelitian ini mendukung Yarni et al. (2019), yang menyebutkan bahwa pemantauan berbasis masyarakat melalui Musdes memperkuat kontrol dan meminimalkan penyimpangan.

### **Comprehensive Spending Review (CSR)**

Aspek rekomendasi perbaikan yang paling dominan dalam penerapan strategi untuk meningkatkan efektivitas anggaran desa di Desa Cariu melalui pendekatan *Comprehensive Spending Review (CSR)* adalah peningkatan komunikasi hasil evaluasi anggaran, koordinasi antara perangkat desa, serta keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah desa dan masyarakat melalui musyawarah desa dapat memperkuat transparansi dan pemahaman tentang penggunaan anggaran desa. Dalam hal ini, hasil evaluasi anggaran perlu disampaikan dengan jelas dan terbuka, agar masyarakat dapat memahami memberikan masukan yang relevan untuk perbaikan di masa mendatang.

Koordinasi yang lebih baik antara perangkat desa, terutama kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), juga menjadi prioritas. Selain itu, keterlibatan masyarakat yang lebih mendalam dalam proses evaluasi anggaran dapat mengurangi jarak antara pemerintah desa dan masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Dari sudut pandang *Theory Agency*, perbaikan dalam komunikasi dan partisipasi masyarakat berfungsi untuk mempersempit ketimpangan informasi antara pemerintah desa sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Penerapan *CSR* akan mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas, dengan tujuan untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien dan sesuai dengan tujuan pembangunan desa.

## **KESIMPULAN**

Implementasi anggaran di Desa Cariu sudah cukup efektif, dengan eksekusi anggaran dan evaluasi yang baik, namun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan analisis data perlu ditingkatkan. Pengukuran kinerja fokus pada pengumpulan data dan partisipasi masyarakat, tetapi koordinasi dan analisis data masih kurang. Meskipun RPJP dan RAPB sudah strategis, partisipasi masyarakat masih terbatas. Implementasi *Comprehensive Spending Review (CSR)* dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran, namun tantangan terkait partisipasi masyarakat dan koordinasi pelaksanaan masih perlu diperbaiki.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi mekanisme peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran desa. Selain itu, penelitian juga dapat memfokuskan pada strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan penerapan penganggaran berbasis kinerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arbayah, S., & Suparti, H. (2022). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. *Jurnal PubBis*, 6(1), 39–48. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v6i1.516>
- Arisman, Putriyani, A., & Afandi, A. (2018). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) Dalam Perspektif Islam. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(2), 293–304. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8860>
- Astuti, S. J. W., Sulistyowati, A., Fauzuddin, Y., & Putra, U. W. (2023). Strategy to Increase the Effectiveness of Capacity Building Programs for Village Owned Enterprises. *Ilomata International Journal of Management*, 4(4), 544–561.
- Diartika, F., & Pramono, R. W. D. (2021). Program Pembangunan Kawasan Perdesaan: Strategi Pengembangan Desa Berbasis Keterkaitan Desa-Kota. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 17(4), 372–384. <https://doi.org/10.14710/pwk.v17i4.34503>
- Fiantika, F. R. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Y. Novita (ed.); 1st ed.). Global Eksekutif Teknologi.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4)(4), 305–360.
- Judijanto, L., Damanik, F. H. S., Saputra, A. M., Ahmadun, A., & Leuwol, N. V. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Publik: Menilai Efektivitas Model Keterlibatan Warga. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 1779–1787. <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i2.2367>
- Kumparan. (2022). *Laporan ICW: Pengelolaan Dana Desa Jadi Kasus Korupsi Terbanyak Pada 2021*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/kumparannews/laporan-icw-pengelolaan-dana-desa-jadi-kasus-korupsi-terbanyak-pada-2021-1xuGNzQHxVx/2>
- Lorenz, C. (2012). *The Impact of Performance Budgeting on Pubic Spending in Germany's Laender*. Springer Sains & Bisnis Media.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Mariyadi. (2024). *Besaran Dana Desa 2024 sesuai UU dan Kemenkeu*. Updesa.Com. <https://updesa.com/besaran-dana-desa-2024/>
- Mauro, S. G., Cinquini, L., & Pianezzi, D. (2021). New Public Management between reality and illusion: Analysing the validity of performance-based budgeting. *British Accounting Review*, 53(6). <https://doi.org/10.1016/j.bar.2019.02.007>
- Nadhiro, R. A., & Choiriyah, I. U. (2024). Community Participation in Village Development Planning. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 25(1), 1–19. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i1.1366>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Albina (ed.); 1st ed.). Harva Creative.
- Opransiski, A. A., & Mashur, D. (2023). Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Igal Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021. *Journal Publicuho*, 6(3), 789–797.
- Rahimallah, M. T. A., & Ricky, R. (2023). Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62–75.
- Raidons, D., & Djawang, J. umbu S. P. (2022). Analisis Pengaruh Sumber Daya Manusia,

Partisipasi Penyusunan Anggaran, Dan Penyusunan Anggaran Terhadap Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Bmpd Timor Tengah Selatan. *Inspirasi Ekonomi Jurnal Ekonomi Manajemen*, 4(1), 70–83. <https://doi.org/10.32938/ie.v4i1.2474>

- Reimassa, L. B., Tinangon, J. J., Wangkar, A., Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2021). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 9(3), 804–811.
- Rony, T. K. (2019). *Kontribusi Desa ke Ekonomi Nasional Bisa Capai Rp 19.912 Triliun dalam 7 Tahun*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3932426/kontribusi-desa-ke-ekonomi-nasional-bisa-capai-rp-19912-triliun-dalam-7-tahun>
- Selviani, D. (2020). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi. *LAND Journal, Volume 1*(108–219).
- Sitorus, R. R., Tambun, S., & Sitorus, H. (2023). Pelatihan Pemanfaatan Software Nvivo untuk Meningkatkan Kompetensi Peneliti di STT Jaffray Jakarta. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2 SE-Articles), 5468–5474.
- Sofyani, H. (2018). Does Performance-Based Budgeting Have a Correlation with Performance Measurement System? Evidence from Local Government in Indonesia. *Foundations of Management*, 10(1), 163–176. <https://doi.org/10.2478/fman-2018-0013>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Wijayanti, R., & Taufik, N. I. (2022). The Role of Village Funds to Improve Community Welfare: A Study in West Bandung Regency. *IJEED (International Journal of Entrepreneurship and Business Development)*, 5(1), 155–163. <https://doi.org/10.29138/ijebd.v5i1.1641>
- Wongkar, D. L., Senduk, V., & Tanor, L. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.630>
- Yarni, M., Kosariza, K., & Irwandi, I. (2019). Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(2), 198–205. <https://doi.org/10.22437/jssh.v3i2.8421>
- Yulia, A., & Ningsih, E. S. (2020). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(1), 50–58. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i1.15433>



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**

---